

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Good Corporate Governance* (GCG)

*Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Narsika Zudiahmi, 2008).

Dalam suatu perusahaan sering muncul adanya konflik kepentingan antar pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Kemudian muncul teori agensi, di mana terjadi pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan. Permasalahan agensi ini muncul karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Kemudian dibuatlah kontrak-kontrak dalam perusahaan baik kontrak antara pemegang saham dengan manajernya maupun kontrak antara manajemen dengan karyawan, pemasok, dan kreditur sebagai cara mengatasi konflik keagenan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, penerapan kontrak relatif sulit dilaksanakan karena pembuatan kontrak yang lengkap

membutuhkan biaya yang mahal. Karenanya, dibuat mekanisme *Good Corporate Governance* untuk mengatasi konflik peran tersebut.

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan, misalnya pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*) dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer yang meliputi mekanisme internal, seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif; dan mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) (Pratama dan Mas'ud dalam Kurniawan, 2008).

Secara komprehensif, Ahmad Juanda (2009) mengartikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* dalam

perusahaan. Adanya nilai tambah bagi *stakeholders* ini akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan.

Lebih lanjut menurut Linan dalam Narsika Zudiahmi (2008) terdapat empat prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG). Keempat prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (*fairness*) yang meliputi: (a) Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham (b) Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.
2. Transparansi (*transparency*) yang meliputi: (a) Pengungkapan informasi yang bersifat penting (b) Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas (c) Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.
3. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang meliputi pengertian bahwa: (a) Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham (b) Penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen (c) Adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*) meliputi: (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang

berkepentingan (d) Jika diperlukan, pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang diterapkan akan memberikan manfaat, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Utama dalam Vinola Herawaty (2008) yaitu:

1. Meminimalkan *agency cost* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara principal dengan agen.
2. Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
3. Meningkatkan citra perusahaan.
4. Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah.
5. Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

Hamonangan dan Mas'ud dalam Kurniawan (2008) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan Manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi). Kepemilikan Manajerial yang besar dapat mencegah manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, karena dengan adanya saham yang dimiliki oleh manajer

maka manajer memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham lainnya.

Selain Kepemilikan Manajerial, peranan Dewan Komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Indikator Dewan Komisaris merupakan persentase jumlah keanggotaan yang berasal dari luar perusahaan (*outside directors*) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan. Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, memastikan perusahaan selalu melaksanakan tanggungjawab sosialnya, dan memantau efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan perusahaan (Gideon dalam Kurniawan, 2008).

Komite Audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *Corporate Governance* perusahaan publik sejak direkomendasikan BEJ pada tahun 2000. Komite Audit bertanggungjawab membantu Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan para *Directors* secara individual dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Bantuan Komite Audit terutama diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akuntansi, manajemen

resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat (Kurniawan, 2008).

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajer yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Marihot dan Doddy dalam Dariyati, 2010).

Dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban manajemen kepada dewan komisaris dan adanya pertanggungjawaban dewan komisaris kepada para pemegang saham. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis

perusahaan. Terlebih lagi, dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*).

## 2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme timbul karena ada kecenderungan dari pihak manajemen untuk menaikkan nilai aset dan pendapatan suatu perusahaan. Konservatisme saat ini lebih dikaitkan dengan kehati-hatian (*prudence*). Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan (Luciana, 2008).

Reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian ini mencoba meyakinkan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam kondisi bisnis cukup layak untuk dipertimbangkan dan pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi adanya ketidakpastian.

Implikasi akuntansi menyatakan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, akuntansi akan memilih perlakuan atau menentukan standar atas dasar munculan yang kurang menguntungkan. Akibatnya, biaya/rugi segera diakui walaupun belum pasti terjadi sementara pendapatan/untung tidak diantisipasi atau diakui walaupun cukup pasti terjadi (Setyaningsih, 2009).

Wibowo dalam Ermayanti 2010 mendefinisikan konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba dan aktiva lebih rendah atau utang lebih tinggi.

Definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai aset dengan nilai yang lebih rendah dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi (Luciana, 2008).

Swardjono dalam Narsika Zudiahmi (2008) Konsep konservatisme menyatakan dalam keadaan yang tidak pasti manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan kejadian atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan. Implikasi konsep ini terhadap prinsip akuntansi adalah akuntansi mengakui

biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar.

Secara umum konservatisme akuntansi merupakan konsep akuntansi yang kontroversial, pada kenyataannya terdapat pro dan kontra seputar penerapan prinsip konservatisme. Banyak kritik mengenai kegunaan suatu laporan keuangan jika penyusunannya dengan menggunakan metode yang sangat konservatif dan para pengkritik konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini menyebabkan laporan keuangan menjadi bias (tidak mencerminkan realita) sehingga tidak dapat dijadikan alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko perusahaan.

Widya dalam Setyaningsih (2009) menyatakan bahwa semakin konservatif akuntansi maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias. Namun akhir-akhir ini banyak peneliti yang melihat konservatisme dari sisi manfaatnya, khususnya eksistensi konservatisme pada level perusahaan. Mayangsari dan Wilopo dalam Setyaningsih (2009) menyatakan bahwa secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena bias digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan.

Setyaningsih (2009) mengatakan konservatisme mempunyai beberapa pandangan atau argument yang mencoba mengerti kondisi yang menimbulkan

unsur kebenaran yang terdapat dalam kendala yang ada sehingga mendapatkan hasil yang baik bagi pelaporan keuangan, yaitu:

- 1) Beban harus diakui sedini mungkin dan pendapatan diakui selambat mungkin oleh karena itu, aktiva bersih (*net assets*) lebih mungkin menghasilkan nilai tertinggi dan perhitungan laba akan menghasilkan yang terendah diantara jumlah alternatif yang ada. Jadi, dari pernyataan ini sikap pesimisme dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan memilih prinsip atau kebijakan dianggap lebih baik daripada sikap optimism dalam pelaporan keuangan. Kecenderungan terhadap pesimisme dianggap perlu karena untuk mengimbangi optimism yang berlebihan dari para manajer dan pemilik. Para pengusaha umumnya optimis tentang perusahaannya sendiri, dan dianggap bahwa optimisme ini cenderung tercermin baik dalam pemilihan maupun penekanan dalam laporan akuntansi.
- 2) Laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang terlalu rendah (*understatement*). Artinya, dianggap bahwa konsekuensi kerugian atau kebangkrutan lebih serius daripada konsekuensi keuntungan.

#### **Manfaat Konservatisme Akuntansi**

Kontroversi mengenai manfaat angka-angka akuntansi yang konservatif belum juga mendapatkan jalan tengahnya. Banyak pendapat yang

menyatakan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat. Tetapi ada juga pendapat yang menentangnya dan beranggapan bahwa konservatisme akuntansi tidak bermanfaat karena mengandung informasi yang bias.

a) Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut. Mayangsari dan Wilopo dalam Fitri Rahmawati (2010) berpendapat adanya berbagai cara untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan konservatisme merupakan kelemahan konservatisme. Disamping itu, konservatisme dianggap sebagai suatu sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu, dimana akuntansi yang mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan, serta menilai aktiva dengan nilai terendah dan kewajiban dengan nilai tertinggi.

b) Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang ada dalam standar akuntansi yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk

membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham (*agency conflict*). Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditor dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya. Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidakbergunaan laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip konservatisme (Mayangsari dan Wilopo dalam Fitri Rahmawati, 2010).

Di Indonesia, praktik konservatisme bisa terjadi karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perusahaan untuk memilih salah satu metode akuntansi dari kumpulan metode yang diperbolehkan pada situasi yang sama. Misalnya, PSAK No. 14 mengenai

persediaan, PSAK No. 17 mengenai akuntansi penyusutan, PSAK No. 19 mengenai aktiva tidak berwujud dan PSAK No. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan. Akibat dari fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi adalah terhadap angka-angka dalam laporan keuangan, baik laporan neraca maupun laba-rugi. Penerapan metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda dalam laporan keuangan (Suaryana dalam Martha, 2010).

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Hubungan antara Komisaris Independen dengan Konservatisme Akuntansi**

Salah satu variabel yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif dalam mekanisme *Good Corporate Governance* adalah dewan komisaris yang dapat mengendalikan perilaku manajer dari *self-serving behavior*. Selain itu peranan dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen dalam menerapkan kebijakan konservatisme akuntansi. Semakin besar jumlah komisaris maka fungsi *service* dan kontrol terhadap perusahaan akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Kusumawati dan Riyanto dalam Nugraha, 2010).

Ukuran dewan komisaris juga dapat mempengaruhi kemampuan memonitor pelaporan keuangan. Mudjiyanti dalam Nugraha (2010), menyimpulkan bahwa mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran atau jumlah dewan mampu mengurangi konflik diantara *stakeholders* dan meningkatkan kepercayaan investor.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya.

Boediono dalam Dariyati (2010) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa secara parsial pengaruh *Corporate Governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ujiyantho dan Pramuka dalam Dariyati (2010) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal

dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba. Dengan masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, akan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan.

Penelitian Hamonangan dan Mas'ud dalam Nugraha (2010) menguji hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan melakukan perbandingan terhadap perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris eksternal (independen) dengan perusahaan yang tidak memiliki komisaris eksternal. Hasilnya, persentase perusahaan yang memiliki komisaris eksternal dalam melakukan tindakan kecurangan lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki komisaris eksternal.

Komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas dalam menjalankan fungsinya. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Komisaris independen yang kuat akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan

cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Berbeda dengan komisaris independen yang lemah yang cenderung menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1:** Independensi dari komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan

## **2. Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Konservatisme Akuntansi**

Kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan dengan principals. Hamonangan dan Mas'ud dalam Atsiruddin (2008) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan.

Jensen dan Meckling dalam Vinola Herawaty (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham

eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya.

LaFond dan Roychowdhury dalam Ratna (2008) menyatakan bahwa konservatisme dalam pelaporan keuangan ini merupakan salah satu mekanisme dalam mengatasi permasalahan agensi ketika timbul pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Mereka menghipotesiskan bahwa dengan semakin kecilnya kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi yang muncul akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat.

Kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba. Sensitivitas manajemen terhadap pengaruh para pemegang saham akan tergantung pada tingkat kontrol kepemilikan manajemen. Manajer yang memiliki kontrol kepemilikan yang besar terhadap perusahaan akan menghindari *self serving behavior* dengan melakukan tindakan manajemen laba, dan cenderung akan semakin konservatif untuk meningkatkan kualitas laba (Hamonangan dan Mas'ud dalam Nugraha, 2010).

Wu dalam Ratna (2008) juga meneliti dampak dari kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang salah satu ukurannya adalah konservatisme dalam pelaporan keuangan. Ia menghipotesiskan hubungan

dua arah antara kedua variabel tersebut. Di satu sisi, manajer dengan kepemilikan ekuitas tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Di sisi lain, akuntansi yang lebih konservatif akan digunakan karena kreditor yang rasional akan mengekspektasikan manajer dengan kepemilikan yang tinggi akan lebih sejalan dengan pemegang saham sehingga kreditor tersebut butuh mekanisme tertentu untuk melindungi nilai investasi mereka. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang lebih tinggi menunjukkan pola yang lebih konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bukti bahwa ada hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H2:** Kepemilikan oleh komisaris dan direksi (manajerial) dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan

### **3. Hubungan antara Komite Audit dengan Konservatisme Akuntansi**

Komite audit dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Disamping itu, komite audit juga harus bisa memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian intern, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Marihhot dan Doddy dalam Dariyati, 2010).

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Fitri Rahmawati, 2010).

Komite audit merupakan unsur penting dalam mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance*. Keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris meningkatkan pengawasan terhadap

manajemen perusahaan, sehingga hal ini dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya (Fitri Rahmawati, 2010).

Di samping itu, komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan, termasuk didalamnya prinsip konservatisme. Dechow et al., McMullen, dan Beasley et al. dalam Ratna (2008) menyatakan bahwa adanya komite audit berhubungan dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah.

Krishnan dan Visuanathan dalam Ratna (2008) juga membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari komite audit tersebut juga berkaitan secara positif terhadap konservatisme. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan pendapat yang menyatakan bahwa keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit memberikan kontribusi terhadap tingkat monitoring yang lebih besar oleh anggota komite audit tersebut sehingga akan meningkatkan tingkat konservatisme yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan.

Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan akan termonitor dengan baik sehingga kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen akan dapat terminimalisir. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu, keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H3:** Keberadaan komite audit akan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan

### C. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

